



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



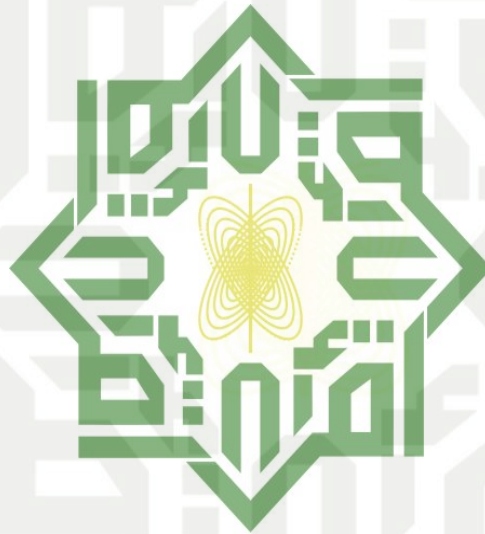
Yandi Pratama

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TENTANG PEMBAYARAN HONOR PEKERJA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN DI KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

YANDI PRATAMA
NIM : 11327100246

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran Di Kabupaten Kampar"*

Nama : YANDI PRATAMA

NIM : 11327100246

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 November 2019

Pembimbing Skripsi

HELLEN LAST FITRIANI SH, MH
NIP. 13021721



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran Di Kabupaten Kampar"*, yang ditulis oleh:

Nama : **YANDI PRATAMA**
 NIM : 11327100246
 Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 31 Desember 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Asir SH, MH

Penguji I
Koni Kurniawan, SH, MH

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yandi Pratama (2019): Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar

Rumah tunggu kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Poskesdes) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan study kepustakaan. Sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumbernya baik melalui wawancara para pekerja rumah tunggu kelahiran, observasi tempat penelitian yaitu di Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum menjadi khusus

Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar sebagaimana yang terdapat dalam surat ikatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017 menyebutkan adanya tugas dan tempat kerja, jangka waktu, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat kesalahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang mana Dinas Kesehatan Kampar tidak membayar uang transport sepenuhnya kepada pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang berada di Kecamatan. Sedangkan konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 pasal 58 menyebutkan bahwa pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang dirasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Rosida yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA serta Wakil Rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, MA serta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH., MH dan Sekretaris Jurusan yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing Helen Last Fitriani, SH, MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis

Penasehat Akademis Mhd. Kastulani, SH, MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis

Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.

Buat keluarga tercinta, adik-adik, Jusi Pramitha, Ilham Pradana, Della Prananda dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

9. Sahabat-sahabat di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.

10. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, Nopember 2019
Penulis

Yandi Pratama
NIM. 11327100246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TEBEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	21
B. Kondisi Georafis dan Demografis.....	23
C. Jumlah Penduduk	24
D. Kondisi Pendidikan	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Perjanjian.....	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	29
3. Syarat Sah Suatu Perjanjian	34
4. Subjek dan Objek Perjanjian.....	37
5. Jenis-Jenis Perjanjian	39
6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Sutau Perjanjian	41
B. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	44
1. Pengertian.....	44
2. Klisifikasi Rumah Tunggu	46
3. Lokasi dan Fungsi Rumah Tunggu Kelahiran	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.....	48
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran-Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	17
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar	24
Tabel II.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kampar	25





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹ Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dijelaskan dalam kitab pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yang menyebutkan bahwa:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat atas hal-hal yang diperjanjikan dengan tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan hubungan hukum adalah mereka yang dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum.² Didalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang ditetapkan dibawah undang-undang.³

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka mereka yang masuk dalam kriteria tersebut tidak bisa membuat suatu perjanjian, dan sebaliknya yang tidak termasuk kriteria tersebut bisa melakukan suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang, sebab yang halal maksudnya adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: RajaGafindo, 2008), h. 18

³ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 341

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas yang utama dalam suatu perjanjian adalah adanya asas yang terbuka atau yang sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Tidak terkecuali dengan perjanjian kerja dimana asas kebebasan berkontrak masih dipakai sebagai asas yang utama, yaitu perjanjian kerja dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan kerja antara majikan dan buruh, dimana mereka telah membuatnya.⁴

Pengertian perjanjian kerja pada umumnya dapat dijumpai dalam pasal 1601 ayat a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.” Menurut Soebekti perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-pertintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.⁵ Sedangkan subjek perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat dalam perjanjian yang dibuatnya. Dalam pengertian ini maka subjek dari perjanjian kerja adalah pengusaha dan pekerja.⁶

⁴ Djumadi, *op.cit.*, h. 23

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, h. 400

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran sentral hukum kontrak dalam merangkai pola hubungan hukum bisnis para pelaku bisnis semakin disadari pentingnya tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu aktivitas bisnis yang mempertemukan pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa didasarkan atas kontrak. Jadi, kontrak mempunyai daya jangkauan yang sangat luas dalam hubungannya dengan masyarakat terutama dalam hal kontrak tenaga kesehatan.

Tenaga honorer kesehatan sebagai abdi negara turut dan ikut berperan aktif dalam aktifitas pelayanan masyarakat dituntut untuk memiliki kompetensi, komitmen dan kinerja yang baik, meskipun harus bekerja dengan upah dan kompensasi yang terbilang jauh dari standar upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Tidak jarang juga kompensasi yang menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi pegawai honorer baru bisa dinikmati dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya fenomena ini tidak berlaku bagi pegawai yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan sistem penggajian yang tetap dan jelas setiap bulannya tentu tidak perlu membuat pegawai dengan status PNS harus memutar otak untuk mencari pekerjaan sampingan guna mencukupi kebutuhannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 yang dimaksud dengan:

1. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.⁷

Dalam realisasinya pengangkatan tenaga honorer sudah berjalan dengan baik karena secara langsung sudah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Akan tetapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja tenaga honorer adalah kurangnya penghasilan atau gaji yang mereka terima, dan bahkan terjadi penunggakan gaji sehingga mengakibatkan kurangnya hasil kinerja mereka.

Dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan implementasi nawa cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitative secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik.

Tahun 2017 Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan sebesar Rp. 26.005.347.699.000,- (dua puluh enam triliun lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp. 17.454.114.999.000,- (tujuh belas triliun empat ratus lima puluh empat milyar seratus empat belas juta sembilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan sebesar Rp. 8.551.232.700.000,- (delapan triliun lima ratus lima puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp. 6.689.644.740.000,- (enam triliun seratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) Jampersal sebesar Rp. 1.563.433.900.000,- (satu triliun lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Akreditasi Puskesmas sebesar Rp 721.763.900.000,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) Akreditasi Rumah Sakit sebesar Rp. 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebesar Rp. 4.390.160.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah). Peningkatan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tiap tahunnya untuk mendanai kegiatan fisik dan nonfisik, diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang bersinergi dengan prioritas nasional, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁸

Dalam konsep pembangunan nasional, kementerian kesehatan bertanggung jawab melaksanakan program Indonesia sehat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera serta terpenuhi, kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pelaksanaan program Indonesia sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintah pusat dan daerah serta antar pelaku pembangunan kesehatan.

Mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan berada di tangan Gubernur/Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan menu kegiatan sesuai prioritas nasional. Untuk itu, pelaksanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, h, 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang kesehatan tahun 2017, kementerian kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki resiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit) maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Angka kematian ibu dan neonatus di Indonesia masih menduduki peringkat yang cukup tinggi, bahkan penurunannya terhitung relatif lambat. Kematian ibu sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, infeksi, dan juga eklamsia. Maka proses persalinan hingga perawatan bayi harus dilakukan dengan sistem yang terpadu di tingkat nasional maupun regional. Pelayanan obstetri dan neonatal di tingkat regional merupakan pelayanan terpadu yang disediakan dalam bentuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit, dan Pelayanan Obstetri Neonatal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emergensi Dasar (PONED) di puskesmas. Dalam perannya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan handal merupakan kunci keberhasilan PONEK dan PONED. Di Indonesia sudah disusun buku pedoman manajemen penyelenggaraan PONEK maupun PONED selama 24 jam di rumah sakit dan juga puskesmas tertentu. Keberadaan PONEK dan PONED sangat membantu menurunkan AKI dan Angka Kematian Bayi (AKB) jika disertai petugas kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pelaksanaannya PONED dan PONEK harus bekerjasama untuk saling mendukung pelayanan ibu dan bayi sebaik mungkin.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan strategi untuk mengatasi masalah kesehatan ibu di Indonesia karena tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, alat dan prosedur yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam mencegah kesakitan dan kematian ibu dan anak. Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2018 tentang pusat data dan informasi yaitu didapatkan berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup.⁹

Dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu yang berdasarkan data nasional tidak dapat dicapai melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah merasa perlu mendukung kebijakan-kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang diputuskan atas pertimbangan

⁹ Kemenkes RI. Pusat Data dan Informasi. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan program jaminan persalinan selama ini. Kementerian Kesehatan melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2017 memberikan tanggung jawab pengelolaan ketangan Bupati/Walikota, melalui kebijakan ini diharapkan pemerintah daerah dapat mendukung program prioritas nasional. Salah satu tujuan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2017 adalah untuk kegiatan pelayanan persalinan melalui penyediaan anggaran bagi operasional program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mengakses pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 pasal 2:

Dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 terdiri atas:

- a. Bantuan operasional kesehatan
- b. Jaminan persalinan
- c. Akreditasi puskesmas
- d. Akreditasi rumah sakit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Akreditasi laboratorium kesehatan daerah.¹⁰

Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Bidang Kesehatan tahun 2017. Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal) serta Akreditasi Puskesmas, akreditasi rumah sakit, serta akreditasi laboratorium kesehatan daerah. Khusus Dana Jampersal tahun 2017 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
- c. Pertolongan persalinan, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.¹¹

Program Jampersal sempat dihentikan menyusul pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setelah ada kucuran dana dari APBN Jampersal kembali diberlakukan tahun 2016. Beberapa mekanisme

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018

¹¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan pada kesehatan ibu oleh pemerintah adalah penghapusan biaya, asuransi, transfer tunai bersyarat, voucher, pinjaman dana untuk biaya transportasi. Sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut jaminan persalinan. Jampersal mengacu pada sistem perlindungan kesehatan sosial merupakan mekanisme yang digunakan negara untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan penyediaan akses ke pelayanan kesehatan untuk warga negara mereka, khususnya segmen masyarakat miskin. Manfaat perluasan perlindungan sosial dalam kesehatan termasuk mengurangi kesulitan finansial untuk mengakses layanan kesehatan dan perlindungan dari kata strofik keuangan serta pemiskinan akibat pengeluaran untuk kesehatan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan menteri tersebut dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 - 3) Langganan air, listrik, kebersihan
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
- e. Honor PNS dan non PNS
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyediaan barang habis pakai
- h. Belanja pencetakan dan penggandaan.
- i. Belanja pengiriman spesimen.¹²

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mardiana pada tanggal 11 Juni 2019 yang merupakan pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mengatakan bahwa: RTK bukan hanya sebagai tempat bagi ibu hamil yang mau melahirkan, melainkan ditempatkannya 2 orang atau lebih pekerja pendamping kesehatan sebagai pendamping bagi ibu hamil yang mau melahirkan. Pekerja pendamping kesehatan tersebut direkrut oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, di mana setiap satu Kecamatan dibuat satu Rumah Tunggu Kelahiran. Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran ini akan menerima uang transport sesuai Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017 yang tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Namun setelah program ini berjalan hingga Januari 2018 ada sekitar 63 orang pekerja rumah tunggu kelahiran yang mendapatkan masalah berupa kontrak yang tidak diperpanjang serta uang transport yang tidak dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.¹³

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum di atas, untuk itu perlu adanya suatu penelitian hukum terhadap penunggakan gaji tenaga kerja honorer Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul: Pelaksanaan Perjanjian

¹² *Ibid*

¹³ Mardiana, Pekerja Rumah Tunggu Kesehatan (RTK) Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, wawancara, 10 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti yakni mengenai pelaksanaan pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di 3 Kecamatan di Kabupaten Kampar yaitu, di Kecamatan Kampa, Rumbio Jaya dan Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor tenaga kerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang pelaksanaan pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
- b. Untuk memberikan penambahan materi hukum kepada semua kalangan masyarakat baik pelajar, mahasiswa, dosen dan instansi-instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan yang pada intinya adalah salah satu syarat dalam melengkapi tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat serta berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif mengenai pelaksanaan pembayaran

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

honor pekerja rumah tunggu kelahiran di Kabupaten Kampar menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneelitan. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena penunggakan honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) tersebut terjadi di kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumbernya baik melalui wawancara para pekerja rumah tunggu kelahiran, observasi tempat penelitian yaitu di Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar yang kemudian diolah oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati yang bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi objek dari penelitian tersebut.¹⁶ Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁷

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Diskes Kab. Kampar	1	1	100
2	Pekerja RTK Kecamatan Kampar	2	2	100
3	Pekerja RTK Kecamatan Kampa	3	3	100
4	Pekerja RTK Kecamatan Rumbio Jaya	2	2	100
Jumlah		8	8	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106

¹⁶ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), h. 170

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, adalah metode-metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁸
- b. Wawancara, adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹
- c. Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Dari pengolahan data yang ada maka analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum menjadi khusus.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 115

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138

²⁰ Zainuddin Ali, *op.cit*, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan memuat tentang sejarah Kabupaten Kampar, kondisi geografis dan demografis, kondisi perekonomian, agama dan adat istiadat

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, subjek dan objek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, akibat hukum suatu perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian, pengertian Rumah Tunggu Kelahiran, Klasifikasi Rumah Tunggu dan lokasi dan fungsi Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran

(RTK) di Kabupaten Kampar dan konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat dari kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kampar

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : I0/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu. Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan dan sebaliknya.²¹

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Percontohan Otonomi. Guna kelancaran roda pemerintahan berdasarkan Permendagri No 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah, sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas (Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum). Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah Kabupaten/ Kota yang baru di Propinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah pemerintahan yaitu:

- a. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 Kecamatan meliputi 153 Desa dan 8 Kelurahan dengan Ibu Kota Bangkinang.
- b. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 4 Kecamatan Kelurahan dengan Ibu Kota Pangkalan Kerinci.
- c. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 89 Desa dan 6 Kelurahan dengan Ibu Kota Pasir Pangaraian.²²

²¹ Arsip Dinas Pemerintahan Kabupaten Kampar Tahun 2018

²² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000'40" Lintang Utara sampai 00027'00" Lintang Selatan dan 100028'30" -101014'30" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM² atau $\pm 11,62$ % dari luas wilayah Propinsi Riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365.98 KM² (12,10%). Sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM².

Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi dalam 21 Kecamatan. Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan daerah atau kabupaten lain di antaranya :

- a. Sebelah Utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Propinsi Sumbar)
- Sebelah Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan.²³

C. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2019 berjumlah 753.681 jiwa, terdiri dari 389.148 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 364.533 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Kampar dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	LK	PR	Jumlah Penduduk
1	Kampar	14.883	13.820	28.702
2	Kampar Kiri Hulu	5.881	5.671	11.552
3	Kampar Kiri Hilir	5.779	5.256	11.055
4	Kampar Kiri Tengah	13.556	12.294	25.850
5	Gunung Sahilan	9.914	8.874	18.787
6	XIII Koto Kampar	11.907	11.296	23.203
7	Koto Kampar Hulu	9.405	8.825	18.230
8	Bangkinang Barat	12.250	11.997	24.248
9	Salo	12.746	12.210	24.957
10	Tapung	47.284	42.847	90.128
11	Tapung Hulu	39.930	36.200	76.128
12	Tapung Hilir	29.854	27.262	57.115
13	Bangkinang	19.215	18.580	37.796
14	Bangkinang Seberang	16.152	15.720	31.873
15	Tambang	24.528	24.282	48.813
16	Kampa	11.857	11.486	23.344
17	Rumbio Jaya	8.444	8.185	16.630
18	Kampar Utara	8.274	8.329	16.609
19	Tambang	29.744	27.931	57.676
20	Siak Hulu	48.683	45.425	94.108
21	Perhentian Raja	8.837	8.043	16.880
Jumlah		389.148	364.533	753.681

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar 2019

²³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar bisa dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II.2
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kampar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	309
2	SD	474
3	MI	17
4	SMP	92
5	MTs	80
6	SMA	41
7	SMK	17
8	MA	46
9	Perguruan Tinggi	3
Jumlah		1.079

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar terdapat 309 unit Taman Kanak-kanak, 474 unit Sekolah Dasar, 17 unit Madrasah Ibtidaiyah, 92 unit SMP, 41 unit SMA, 17 unit SMK, 46 unit Madrasah Aliyah dan 3 unit Perguruan Tinggi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum yang di pelajari menjelaskan bahwa suatu perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu sesuatu perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²⁴

Pada umumnya kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, suatu perikatan itu lahir dari suatu bentuk perjanjian yang di buat antara mereka yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan tak dapat dipungkiri pula bahwa suatu perjanjian memiliki peran penting dalam berkegiatan di dalam masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sekalipun. Eksistensi sebuah perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya pada Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena undang-undang.

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht*, di mana tercakup pula istilah *overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.²⁵ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁶

Memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

- a. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁷
- b. Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh

²⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), h. 41

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), (Jakarta: Buana Press, 2014), 376

²⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2005), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain menunaikan prestasi.²⁸

- c. Menurut Van Dunne di dalam Salim, HS, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.²⁹

Apabila diperhatikan definisi perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian yaitu:

1. Ada pihak-pihak, setidaknya-tidaknya dua orang.

Para pihak yang membuat perjanjian itu disebut subjek perjanjian, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu dan berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, tidak sedang berunding. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain.

3. Ada tujuan yang dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh

²⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung, Alumni, 1982), h. 6

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka lahirlah kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Prestasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai yang diperjanjikan.

5. Ada bentuk tertentu

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa kata yang dapat dibuat secara lisan, maksudnya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dan dapat dipahami oleh pihak-pihak.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini merupakan isi perjanjian yaitu untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat pokok yaitu akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai harganya, sedangkan syarat pelengkap atau syarat tambahan misalnya mengenai cara pembayaran, cara penyerahan.

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam membuat ataupun melaksanakan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, namun dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian patutnya kita mengetahui asas-asas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam suatu perjanjian, adapun asas-asas umum hukum dalam perjanjian tersebut antara lain:

a. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁰

Asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang juga menjelaskan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang isinya apa saja yang ia kehendaki. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian- perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian

³⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.³¹

Asas ini memiliki landasan hukumnya pada Pasal 1320 angka 1 yang dalam bunyi pasalnya menyatakan salah satu sahnya suatu perjanjian jika adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri, hal ini dapat di artikan bahwa kata sepakat berarti telah terjadi konsensus secara tulus tidak ada kekilapan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

c. Asas kepercayaan

Ketika seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, para pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³²

³¹ Subekti, *op.cit*, h. 15

³² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas kedudukan yang sama atau seimbang

Asas ini dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya pada Pasal 1320 ayat 2 KUH Perdata yaitu: Kecakapan untuk membuat perjanjian. Hal ini dijabarkan kembali dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu tentang cakap dalam membuat suatu perjanjian oleh orang yang sudah dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata dan tidak berada di bawah pengampuan seperti pada Pasal 433 KUH Perdata. Karena apabila seseorang yang normal membuat perjanjian dengan orang yang tidak normal dalam hal fisik maupun psikologis, berarti terjadi akan ketidakseimbangan dimana kondisi orang yang secara fisik dan psikologis kuat berhadapan dengan orang yang secara fisik dan psikologis lemah, jadi suatu perjanjian dapat dibuat apabila terdapat suatu kedudukan yang seimbang di antara mereka yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

e. Asas itikad baik

Asas ini dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa sesungguhnya para pihak antara pihak kreditur dan pihak debitur haruslah melaksanakan suatu perjanjian dengan dilandasi itikad baik di dalamnya.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

f. Asas kepastian hukum

Bahwa pada Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan dalam suatu perjanjian sebagai produk hukum haruslah memiliki suatu kepastian hukum, yang mana kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya bahwa suatu perjanjian yaitu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h. Asas perjanjian mengikat para pihak

Asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian berlaku (mengikat) sebagai undang-undang, dan pada Pasal 1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut.³³

3. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Selain dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan melihat beberapa asas-asas umum dalam hukum perjanjian, juga suatu hal yang wajib di penuhi dalam melaksanakan suatu perjanjian yaitu memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam ilmu hukum kontrak (*law of contract*) di Amerika ditentukan adanya empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

³³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya penawaran (*offer*) serta penerimaan (*acceptance*).
- b. Adanya penyesuaian kehendak (*meeting of minds*)
- c. Adanya prestasi (konsiderasi).
- d. Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).³⁴

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan terkait empat syarat sahnya suatu perjanjian antara lain :

- 1) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya, maksud dari kesepakatan itu adalah terjadinya suatu persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat perikatan, maksud dari kecakapan disini adalah kecakapan dalam bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum itu sendiri adalah suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang yang akan mengadakan suatu perjanjian adalah harus orang yang sudah cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dan ditentukan pada KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa orang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Untuk ukuran kedewasaan seseorang itu sendiri juga dijelaskan yaitu berusia 21 tahun dan atau sudah kawin (dijelaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata). Sedangkan

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h.161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a) Anak dibawah umur
 - b) Orang yang masih dibawah pengampuan
 - c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (dijelaskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata).
- 3) Adanya suatu persoalan atau obyek tertentu, maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek ataupun persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.³⁵
- 4) Adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal, memang tidaklah terdapat penjelasan terkait suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Hoge Raad pada tahun 1927 memberi pengertian suatu sebab yang halal (*orzaak*) sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak. Kemudian pengertian lebih lanjut terkait suatu sebab yang halal dijelaskan pada Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata, yang mana Pasal 1335 menjelaskan bahwa: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum..³⁶

4. Subjek dan Objek Perjanjian

Menurut R. Subekti, yang termasuk dalam subjek perjanjian antara lain:

- a. Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut, siapapun yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
- b. Ada kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan), dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya.³⁷

Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*veerneetigbaar*), artinya perjanjian tersebut batal jika ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan untuk objek perjanjian, dinyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurangkurangnya objek tersebut dapat ditentukan. Bahwa objek tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan benda yang nanti akan ada. Sehingga dapat disimpulkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian, antara lain:

³⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, h. 161

³⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Barang-barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdara).
- 2) Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 KUHPerdara) tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.
- 3) Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (pasal 1334 ayat 2 KUHPerdara).³⁸

Sedangkan barang-barang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian adalah :

- 1) Barang-barang di luar perdagangan, misalnya senjata resmi yang dipakai Negara.
- 2) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang, misalnya narkoba.
- 3) Warisan yang belum terbuka.³⁹

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

³⁸ *Ibid*, h. 451

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1974), h. 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, perbedaan tersebut antara lain:⁴⁰

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan Kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian cuma-cuma atau perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*)

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara dan KUHD, tetapi hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.

d. Perjanjian *kebendaan (zakelijk)* dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum KUHPdata perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang diperjual-belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli tersebut dinamakan perjanjian obligatoir, dan penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut perjanjian jual beli sementara.

e. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPdata perjanjian ini telah mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil adalah perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPdata), pinjam pakai (pasal 1740 KUHPdata).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:

- 1) Perjanjian liberatoir, yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang atau *kwijtsschelding* (pasal 1438 KUHPerdota).
- 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi (pasal 1774 KUHPerdota).
- 4) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebahagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak adalah penguasa yang bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian ikatan dinas.⁴¹

6. Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1338 KUHPerdota semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak. Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian yang sah

⁴¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.⁴²

Menurut pasal 1381 KUHPerdara terdapat beberapa cara berakhirnya perjanjian :⁴³

a. Pembayaran

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja oleh buruh.

- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di dalam pasal 1404 KUHPerdara.

c. Pembaharuan utang (novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) macam jalan untuk untuk melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:

- 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- 2) Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, h. 168

⁴³ Kitab Undang Hukum Perdata, Buana Press, 2004, h. 389

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUHPerdara). Untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut :

- 1) Kedua-duanya berpokok sejumlah uang
 - 2) Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
 - 3) Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
- e. Pencampuran utang

Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (pasal 1436 KUHPerdara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau si kreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari si debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

g. Musnahnya barang yang terutang

Menurut pasal 1444 KUHPdata, jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus.

B. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

1. Pengertian

Rumah Tunggu adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Poskesdes) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.⁴⁴

⁴⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Sistem Kesehatan Nasional*, (Jakarta: 2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sasaran program rumah tunggu adalah sebagai berikut:

- a. Ibu dengan faktor resiko dan risiko tinggi yaitu: Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun
- b. Anak lebih dari 4
- c. Jarak persalinan terakhir dengan kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun
- d. Kurang energi kronis (KEK) dengan lingkaran lengan atas kurang dari 23,5 cm atau penambahan berat badan < 9 kg selama masa kehamilan.
- e. Anemia dengan Haemoglobin < 11 g/dl
- f. Tinggi badan kurang dari 145 cm atau dengan kelainan bentuk pinggul dan tulang belakang
- g. Riwayat hipertensi dalam kehamilan sebelumnya atau sebelum kehamilan ini.
- h. Sedang/ pernah menderita penyakit kronis, antara lain: Tuberculosis kelainan jantung ginjal hati, psikosis, kelainan endokrin (Diabetes melitus, Sistemik Lupus Erythematosus) tumor dan keganasan.
- i. Riwayat kehamilan buruk: Keguguran berulang, kehamilan ektopik terganggu, molahidotosa, ketuban pecah dini, bayi dengan cacat kongenital.
- j. Persalinan dengan komplikasi: Persalinan dengan seksio sesaria, ekstraksi vakum/forceps.
- k. Riwayat nifas dengan komplikasi: Perdarahan pasca persalinan, infeksi masa nifas, psikosis post partum (*post partum blues*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Riwayat keluarga menderita penyakit kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital.
- m. Kelainan jumlah janin: Kehamilan Ganda, janin dampit.
- n. Kelainan besar janin: Pertumbuhan janin terhambat, janin besar
- o. Kelainan letak dan posisi janin: Lintang/oblique, sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.⁴⁵

2. Klasifikasi Rumah Tunggu

Adapun klasifikasi di rumah tunggu sebagai berikut:

- a. Rumah tunggu kelahiran tanpa pelayanan

Merupakan salah satu bentuk rumah tunggu kelahiran yang hanya menyediakan fasilitas untuk tinggal saja. Rumah ini dapat terdiri dari ruangan-ruangan yang berisi mebel standar, dapur dengan peralatannya serta kamar mandi. Ibu hamil dan pendampingnya dapat tinggal disini, tetapi dengan menyediakan keperluan sehari-harinya sendiri, seperti berbelanja, memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta memenuhi segala keperluan pribadinya.

- b. Rumah tunggu kelahiran dengan pelayanan

Rumah Tunggu ini selayaknya sebuah penginapan. Ibu hamil dapat tinggal disini dengan mendapatkan pelayanan seperti makanan dan minuman, mencuci pakaian dan lain-lain (tergantung kesepakatan setempat). Pengadaan kebutuhan sehari-hari untuk ibu hamil selama

⁴⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumah tunggu kelahiran dapat dikelola oleh masyarakat melalui biaya dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun donatur.

- c. Rumah Tunggu Kelahiran dengan pelayanan tambahan

Rumah Tunggu Kelahiran model ini menyediakan berbagai macam kegiatan tambahan seperti memberikan ketrampilan perempuan, penyuluhan kesehatan, peningkatan pendapatan dan sebagainya.⁴⁶

3. Lokasi dan Fungsi Rumah Tunggu Kelahiran

Lokasi dan fungsi rumah tunggu kelahiran dapat di bedakan sebagai berikut:

- a. Rumah tunggu poskesdes, yaitu rumah tunggu yang berada dekat poskesdes, digunakan bagi ibu hamil yang non-risiko
- b. Rumah tunggu puskesmas yaitu, rumah tunggu yang berada di dekat puskesmas, digunakan bagi ibu hamil yang non-resiko atau yang memiliki resiko yang dapat ditangani sesuai kemampuan puskesmas.
- c. Rumah tunggu rumah sakit yaitu rumah tunggu yang berada dekat rumah sakit, digunakan bagi ibu hamil dengan resiko tinggi.⁴⁷

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar sebagaimana yang terdapat dalam surat ikatan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2017 menyebutkan adanya tugas dan tempat kerja, jangka waktu, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat kesalahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar yang mana Dinas Kesehatan Kampar tidak membayar uang transport sepenuhnya kepada pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang berada di Kecamatan.
2. Konsekuensi hukum terhadap penunggakan pembayaran honor Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Kampar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 pasal 58 menyebutkan bahwa pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja tentang pembayaran honor pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar agar dapat membayar upah kepada pekerja Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), karena itu merupakan hak bagi mereka.
2. Hendaknya aturan yang dibuat harus ditegakkan dan di jalankan, karena di dalamnya telah memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Baik dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar maupun dari pihak pekerja Rumah Tunggu Kelahiran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Kementerian Kesehatan RI, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta: 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Jakarta: Buana Press, 2014
- Mariam Darus Badruzaman,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Medan: Penerbit Fakultas Hukum USU,1974
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986

Undang-Undng nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI,**

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran Di Kabupaten Kampar"*, yang ditulis oleh :

Nama : **YANDI PRATAMA**
NIM : **11327100246**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 31 Desember 2019**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Basir SH, MH

Penguji I
Toni Kurniawan, SH, MH

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH, MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Eri Surianto, SH.I

NIP. 19670218 199303 1 006



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Yang saya Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YANDI PRATAMA
NIM : 11327100246
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul : *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar*

Pembimbing : Helen Last Fitriani, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 2 Januari 2020

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
TENTANG PEMBAYARAN HONOR PEKERJA RUMAH TUNGGU
KEWAHIRAN DI KABUPATEN KAMPAR, ditulis oleh saudara :

Nama : Yandi Pratama

NIM : 11327100246

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Januari 2019

Narasumber : Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

Asfendi S. Ag, M. Si
NIP. 19600918 198803 1 002

Pekanbaru,
Narasumber

Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag
NIP. 19591231 198703 1 037



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

HELLEN LAST FITRIANI SH, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 1 November 2019

N : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdra. YANDI PRATAMA

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ARMADA, yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA TENTANG PEMBAYARAN HONOR PEKERJA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN DI KABUPATEN KAMPAR" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

HELLEN LAST FITRIANI SH, MH
NIP. 13021721

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yandi Pratama, lahir di Kampar pada tanggal 08 September 1995. Anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda Zulkifli. dan ibunda Rosida. Pendidikan formal ditempuh penulis adalah SDN 034 Kampar, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di PP Islamic Center Al-Hidayah Kampar, lulus pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Kampar Timur, lulus pada tahun 2013. Tidak cukup hanya menduduki bangku pendidikan selama 12 tahun, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan bidang studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengajukan judul penelitian pada bulan januari dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tentang Pembayaran Honor Pekerja Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Kampar". Penulis melaksanakan ujian sempro pada bulan Januari 2019. *Alhamdulillah*, pada tanggal 31 Desember 2019 penulis mempertahankan ini didepan penguji dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan Nilai Prestasi Kumulatif (IPK) 3.30 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum, (S,H)